

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sedangkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan pembangunan di segala bidang baik itu pembangunan secara fisik maupun secara psikis. Pembangunan dapat terlaksana dengan adanya usaha-usaha kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan tanpa landasan, tujuan dan arah yang jelas tidak akan memperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu di samping kemampuan aparat pemerintah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas dari pembangunan itu diperlukan juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat guna mensukseskan pembangunan itu.

Berdasarkan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 maka pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap. GBHN adalah cerminan pernyataan kehendak rakyat untuk memberikan arah bagi pembangunan Nasional. Kegiatan pembangunan dilakukan melalui pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta dilaksanakan secara terpadu dan saling isi mengisi.

Pada hakekatnya fungsi dan peranan Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terutama dalam rangka membangun masyarakat, bagi setiap

negara tidak selalu sama. Hal ini tergantung pada beberapa hal pokok antara lain :

“ Pertama adalah falsafah hidup kemasyarakatan dan kedua adalah falsafah politik masyarakat tersebut. Fungsi dan peranan pemerintah dan juga seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama dibidang ekonomi materiil “. ¹

Bagi negara Republik Indonesia, peranan pemerintah didalam segenap aspek kehidupan masyarakat sangat menonjol. Namun demikian tidaklah dimaksudkan bahwa segala sesuatunya akan diurus oleh pemerintah. Peranan itu terutama ditujukan kepada pelaksanaan rangkaian usaha dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus menggerakkan segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan.

Salah satu unsur yang sangat potensial dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan dewasa ini adalah keberadaan instansi-instansi pemerintahan khususnya Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Berjalannya roda organisasi di Kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal ditentukan oleh pegawai dan stafnya. Dengan dukungan sumber daya manusia pada instansi pemerintahan tersebut maka instansi tersebut dapat digerakkan sebagaimana tujuannya.

Jadi disini fungsi pegawainya sangat penting dalam menggerakkan organisasi dimana mereka berada dan salah satunya adalah dengan memberikan peningkatan sumber daya kepada mereka sehingga mereka dapat meningkatkan prestasi kerjanya.

¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974, hal. 17.